

## PEMKOT BENGKULU FOKUS TURUNKAN ANGKA STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM



Sumber gambar: Anggi Mayasari/Bengkulu.antaranews.com

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menerangkan, saat ini pihaknya fokus dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

"Berbagai program pemerintah fokus untuk menekan angka stunting dan menurunkan angka kemiskinan di Kota Bengkulu," kata Penjabat Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi di Kantor Wali Kota Bengkulu, Senin.

Oleh karena itu, Pemkot Bengkulu melaksanakan rapat terkait evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting pada 2024 di Bengkulu.

Melalui kegiatan tersebut, terang Arif, dirinya menekankan peran aktif berbagai pihak dalam menekan angka stunting dan kemiskinan khususnya di Kota Bengkulu.

Salah satunya melalui peran puskesmas di seluruh kelurahan Kota Bengkulu dengan kegiatan posyandu untuk mendeteksi sejak dini indikasi stunting pada anak-anak.

"Posyandu di puskesmas itu difokuskan. Kalau ada bantuan Baznas Kota Bengkulu terhadap orang tidak mampu, tolong prioritaskan anak terindikasi stunting ini. Jangan sampai bantuan kita tidak tepat sasaran. Pada intinya masalah ini menjadi perhatian kita bersama," ujar dia.

Dengan demikian, pada 2024 diharapkan adanya penurunannya signifikan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Kota Bengkulu.

"Dengan adanya fasilitas hingga bantuan yang kita sudah serahkan dari program-program ali kota terdahulu sampai sekarang yang tetap kita lanjutkan," terangnya.

Sementara itu, hingga saat ini telah 204 kelompok tim pendamping keluarga (TPK) yang berasal dari 67 kelurahan dan sembilan kecamatan untuk membantu menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Sebab, masing-masing kelurahan wajib membentuk minimal satu TPK untuk pencegahan stunting dengan satu kelompok terdiri dari tiga orang sehingga total anggota pendamping keluarga di Kota Bengkulu sebanyak 612 Orang.

"Terkait stunting, kita dari DP3AP2KB terus mendampingi keluarga berisiko stunting mulai dari calon pengantin, ibu hamil, pasca bersalin hingga bayi bawah dua tahun (Baduta)," sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dewi Dharma.

Diketahui, angka kemiskinan di Kota Bengkulu pada 2022 di angka 15,73 persen dan untuk kemiskinan ekstrem di angka 5,63 persen, sedangkan angka stunting pada 2022 di angka 12,9 persen.

### **Sumber berita:**

1. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/322872/pemkot-bengkulu-fokus-turunkan-angka-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem>, Pemkot Bengkulu fokus turunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, 11/12/2023
2. <https://siberzone.id/pemkot-bengkulu-fokus-turunkan-angka-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem>, Pemkot Bengkulu Fokus Turunkan Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, 11/12/2023

3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/807808/stunting-dan-kemiskinan-ekstrem-jadi-fokus-pemerintah>, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Jadi Fokus Pemerintah, 13/12/2023

**Catatan:**

1. **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting**

**Pasal 1 angka 1**

*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

**Pasal 1 angka 4**

Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

**Pasal 10 ayat (2)**

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

**Pasal 21 ayat (1)**

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

2. **Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024**

**Pasal 6**

Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan

**Pasal 12 ayat (2)**

Bupati/Walikota melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Gubernur.